

Judul : Cegah kenaikan beban rakyat, DPR minta BI aktif jaga stabilitas rupiah
Tanggal : Sabtu, 16 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kenaikan Beban Rakyat

DPR Minta BI Aktif Jaga Stabilitas Rupiah

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta otoritas fiskal dan moneter memperkuat langkah mitigasi menyusul tekanan nilai tukar rupiah. Misbakhun menekankan, pelemahan kurs harus diantisipasi serius agar tidak bertransmisi jadi inflasi impor.

MISBAKHUN menyebut, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak terlepas dari dinamika di tingkat global. Masalah yang dihadapi mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Makanya, tekanan eksternal itu tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil domestik.

Misbakhun mendorong Bank Indonesia (BI) terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar spot. Langkah stabilisasi bisa lewat *Domestic Non-Deliverable Forward* maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Itu wajib dilakukan secara presisi agar menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa," katanya, Jumat (15/5/2026).

Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah wajib memastikan agar DHE tetap masuk ke

sistem keuangan dalam negeri. Langkah ini untuk memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah semakin besarnya tekanan global saat ini.

Untuk menjaga sektor industri padat karya, Misbakhun meminta Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyiapkan skenario antisipasi pada APBN. Pemerintah harus membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku impor. Jangan sampai pelemahan rupiah berdampak pada naiknya biaya produksi yang nantinya dibebankan ke masyarakat.

Misbakhun memastikan, Komisi XI DPR akan terus memantau perkembangan indikator makro ekonomi nasional. Pihaknya mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas. "Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun saat



Mukhamad Misbakhun

ini harus dijaga bersama," katanya.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus kisaran Rp 17.600 per dolar AS merupakan sinyal adanya tekanan eksternal dan domestik yang terjadi secara bersamaan. Makanya, yang harus dilakukan Pemerintah dan BI saat ini adalah tetap menjaga kepercayaan pasar.

Marwan menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum bisa disamakan dengan krisis 1998, karena fundamental nasional relatif masih lebih kuat. Cadangan devisa masih berada

pada level aman dan rasio utang Pemerintah terkendali. Ditambah lagi, sistem perbankan sehat serta menerapkan rezim nilai tukar mengambang.

Kendati demikian, dia mengingatkan agar para pengambil kebijakan tidak boleh membiarkan begitu saja pelemahan ini. Pasalnya, volatilitas nilai tukar yang terlalu tinggi bisa memicu inflasi impor, serta meningkatkan biaya utang luar negeri. "Dampak akhirnya memperburuk persepsi pasar, menekan daya beli, dan investasi," ingatnya.

Marwan menilai, BI harus melanjutkan strategi stabilisasi melalui intervensi di pasar *spot* serta *Domestic Non-Deliverable Forward*. Selain itu, intervensi pasar *offshore* juga harus dilakukan secara selektif. Langkah itu dijalankan dengan perhitungan matang agar tidak menggerus cadangan devisa secara berlebihan di dalam negeri.

Selanjutnya, dia menekankan penguatan komunikasi kebijakan dari BI agar tetap menjaga ekspektasi dan kepercayaan pelaku pasar. Dalam situasi tekanan pasar, persepsi sering kali lebih menentukan dibanding data fundamental yang dimiliki. Keberadaan *for-*

ward guidance yang jelas akan sangat membantu meredam aksi spekulasi.

Marwan mengapresiasi langkah pembatasan pembelian dolar AS yang dilakukan tanpa *underlying transaction*. Hanya saja, otoritas moneter harus mengimplementasikan kebijakan itu secara hati-hati. Pemerintah juga wajib memperketat pengawasan repatriasi devisa hasil ekspor sumber daya alam yang selama ini masih banyak parkir di luar negeri.

Terkait kebijakan suku bunga, Marwan menilai kenaikan akan membantu menahan keluarnya dana dari dalam negeri atau *capital outflow*. Kebijakan itu menjaga daya tarik aset domestik. Namun kenaikan terlalu agresif berisiko menekan kredit, investasi, dan konsumsi. "Pendekatan gradual jadi pilihan rasional menjaga pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan upaya awal Pemerintah dalam menstabilisasi nilai tukar rupiah. Salah satunya, melalui pasar obligasi. Saat ini, nilai memang berada di atas asumsi APBN 2026 kisaran Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS, namun posisi fiskal aman. ■ PYB